

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian mengenai analisis pengaruh *deferred tax liabilities*, corporate governance, dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba ini didasarkan pada kajian teori berikut:

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan basis yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang digunakan selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan kontraktual antara pihak yang memberi wewenang yaitu *principal* dengan pihak yang menerima wewenang yaitu *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Anthony dan Govindrajan (2005) berpendapat konsep teori agensi sebagai hubungan kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* sebagai pemilik akan mendelegasikan tanggung jawabnya kepada *agent* sebagai manajemen, dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik.

Hubungan antara *principal* dan *agent* ini seringkali menimbulkan masalah keagenan, yaitu berupa konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dengan manajemen dilandasi karena keduanya baik *principal* ataupun *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dan dalam hubungan kontrak yang terjadi, mereka berusaha untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing.

Dengan demikian, principal berada sebagai asimetri informasi karena *agent* lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan principal. Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara *principal* dan *agent* memacu *agent* untuk memikirkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan.

2. *Discretionary Accruals*

a. Definisi *Discretionary Accruals*

Discretionary Accruals adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu (Rahmawati, 2012: 111). Pilihan kebijakan tersebut terdiri atas pilihan kebijakan akuntansi dari garis lurus ke saldo menurun atau kebijakan dalam pengakuan pendapatan, dan pilihan atas akrual kebijakan seperti, provisi kerugian kredit, biaya jaminan, dan nilai persediaan. Manajemen laba dalam definisi sempit yaitu berkaitan dengan pemilihan metode-metode akuntansi, yang diartikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*, sedangkan manajemen laba dalam definisi luas dapat diartikan sebagai tindakan manajer untuk menyajikan laporan yang meningkat (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung

jawabnya tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut (Sugiri, 1998).

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Belkaoui (2006: 75) berpendapat bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan dan dalam melakukan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi *stakeholder* tentang kinerja ekonomis perusahaan, ataupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

b. Motivasi Discretionary Accruals

Scott (2011) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, diantaranya sebagai berikut:

1) Motivasi bonus (*Bonus Purpose*)

Biasanya perusahaan akan memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Seringkali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2) Motivasi kontraktual (*Contractual Motivation*)

Berkaitan dengan utang jangka panjang, manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak akan menimbulkan sanksi. Oleh karena itu, manajer akan melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.

3) Motivasi politik (*Political Motivation*)

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri strategis karena aktivitasnya melibatkan kepentingan publik. Perusahaan besar dan industri strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

4) Motivasi pajak (*Taxation Motivation*)

Pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Manajemen cenderung melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, ataupun sebaliknya perusahaan justru memanfaatkan peluang penundaan beban pajak untuk meningkatkan labanya.

5) Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa pension akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecahannya, CEO baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya.

6) *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang baru pertama kali akango *public* akan melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan.

7) Pemberian informasi kepada investor (*communicate information to investors*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada periode saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

c. Bentuk-bentuk Discretionary Accruals

Bentuk-bentuk manajemen laba diantaranya adalah sebagai berikut (Rahmawati, 2012: 117);

- 1) *Taking a bath*, yaitu pola yang dijalankan ketika perusahaan dalam kondisi tertekan atau sedang melakukan reorganisasi atau penunjukkan CEO baru. Maka manajer cenderung melaporkan laba bersih yang rendah sekarang dengan harapan meningkat di masa yang akan datang.
- 2) Minimalisasi laba, yaitu pola yang dilakukan dalam kondisi laba yang tinggi, maka untuk mengurangi visibilitasnya dia melakukan kebijakan manajemen laba.
- 3) Maksimalisasi laba, yaitu pola yang dilakukan ketika manajer ingin menaikkan bonusnya, dan diharapkan pada perjanjian utang yang hampir dilanggar.
- 4) Peralatan laba, merupakan pola yang paling sering dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang akan dihadapi perusahaan.

3. *Deferred Tax Liabilities*

Pajak tangguhan (*Deferred tax*) merupakan dampak PPh di masa akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*taxloss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dalam PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak

Penghasilan, pajak tangguhan merupakan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan, sebaliknya juga bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan (Suandy, 2011: 99).

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

- a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui apabila induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.
- b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.
- c. Kewajiban pajak tangguhan harus diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersialo dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan asset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.

4. *Corporate Governane*

Menurut The Indonesian Institute for Governance (IICG), Corporate Governance

Merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sedangkan definisi untuk Good Corporate Governance (GCG) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk member nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) terdapat 5 asas *good corporate governance* (GCG) sebagai berikut:

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairnes*(kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Mekanisme *corporate governance* harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, termasuk dewan komisaris, dewan direksi yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *corporate governance* secara efektif. Apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *goodcorporate governance* tersebut, pengawasan atas semua aktivitas perusahaan akan lebih efektif. Apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, pengawasan atas semua

aktivitas perusahaan akan lebih efektif sehingga pengendalian internal perusahaan dapat berjalan dengan baik. Praktik *corporate governance* dalam perusahaan akan memperkecil kesempatan dan itikad buruk manajemen untuk melakukan kecurangan. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dengan kaitannya terhadap manajemen laba adalah komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan jumlah dewan komisaris.

a. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan salah satu pihak penting dalam pelaksanaan *corporate governance*. Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-643/BL/2012 komisaris independen merupakan anggota yang:

- 1) Berasal dari luar emiten atau perusahaan public
- 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan public
- 3) Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik

Komisaris independen diangkat dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota

dewan komisaris lainnya (penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Keberadaan komisaris independen menjadi penting karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham public serta *stakeholder* lainnya. Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Adapun komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan penasehat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Tugas komisaris independen diantaranya adalah sebagai berikut (Amri, 2011):

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- 2) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

- 3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- 4) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.

Dalam mengelola perusahaan menurut kaidah umum (*Good Corporate Governane*) secara umum peran komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. Pada intinya komisaris independen merupakan suatu mekanisme independen (netral) mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan, yang dengan independensinya dapat mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen antara lain ; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan (Warsono *et al.* , 2009).

c. Komite Audit

Komite audit sering disebut sebagai salah satu keberhasilan *corporate governance*. Komite audit merupakan *subset* dari dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses

pelaporan keuangan perusahaan (Klein, 2002) dan meningkatkan prosedur pengendalian internal, pelaporan eksternal dan manajemen risiko perusahaan. Komite audit juga memainkan peran penting sebagai saluran untuk memfasilitasi komunikasi antara dewan komisaris, auditor eksternal dan auditor internal.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang (Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008: 148), yaitu:

1) Laporan keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2) Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melakukan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3) Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta

memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

5. Struktur Kepemilikan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki, struktur kepemilikan dikelompokkan atas kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Semakin besar jumlah kepemilikan saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan maka akan mengurangi tindakan manajemen laba. Kepemilikan saham oleh institusi lain yang besar akan meningkatkan pengawasan investor terhadap kinerja manajemen perusahaan akan semakin ketat, sehingga sedikit kemungkinan manajemen perusahaan melakukan manajemen laba.

Menurut Maharani dan Ramantha (2014) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya). Adanya kepemilikan

institusional diduga mampu memberikan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai kepentingan dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba, namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Balsam *et al.*, 2002 dalam Mahariana dan Ramantha, 2014). (Tethanian *et al.*, 2006 dalam Nundini dan Lastanti, 2014) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri, jadi manajer tidak akan melakukan manajemen laba karena adanya pengawasan oleh hak investor institusional.

b. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dalam perusahaan, dimana saham tersebut dipegang oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan komisaris) (Dela dan Sunaryo, 2010).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun tolak ukur dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, tabel berikut menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai tingkat *discretionary accruals*, diantaranya:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Oktorini Indriani Siagian (2014)	Perubahan liabilitas pajak bersih, tata kelola perusahaan.	Perubahan liabilitas pajak bersih, tata kelola perusahaan, berpengaruh negatif terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> .
2	I Dewa Gede Pingga Mahariana dkk (2014)	Menggunakan variabel independen berupa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan variabel dependen berupa manajemen laba	Bahwa kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> , sedangkan kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> .
3	fanny Pangaribuan (2014)	Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012	Menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> , sedangkan komite audit, kualitas audit, dan Risk Management Committee tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i>
4	Kasipilai Jeyapalan dan Mahenthiran Sakthi (2013)	Hubungan antara deferred tax, earning management, dan corporate governance	Menemukan terbukti menggunakan komponen deferred tax untuk menghindari terjadinya tingkat <i>discretionary accruals</i> .
5	Metta Kusumaningtyas (2012)	Menganalisis pengaruh independensi komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.	Bahwa independensi komite audit dapat mengurangi tingkat <i>discretionary accruals</i> , sedangkan kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi tingkat <i>discretionary accruals</i> .

Lanjutan tabel 1

No	Peneliti	Variabel	Hasil
6	Indri Wahyu Purwandari (2011)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> terhadap praktik manajemen laba.	Bahwa komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh negative terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran direksi, proporsi komisaris independen dan tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> , sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> .
7	Tutut Dwi Andayani (2010)	Dewan komisaris terhadap manajemen laba. Karakteristik dewan komisaris adalah dewan komisaris independen yang mempunyai rangkap jabatan dengan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i>
8	Bayu Fatma Widiatmaja (2010)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan.	Bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> . Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> , sedangkan ukuran komite audit berpengaruh negative terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> .
9	Rini Budi Utami dan Rahmawati (2008)	Pengaruh komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.	Bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> , sedangkan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>discretionary accruals</i> .

C. Kerangka Pemikiran

tingkat *discretionary accruals* merupakan suatu kemampuan untuk mengubah laporan keuangan, kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Belkaoui, 2006: 75).

Deferred tax liabilities merupakan kewajiban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2003: 115). Dalam penelitian Kasipilai dan Mahenthiran (2013) menyebutkan bahwa perusahaan menggunakan komponen pajak tangguhan untuk menghindari perununan laba. Sejalan dengan itu penelitian (Siagian, 2014) juga menyebutkan bahwa perubahan *Net deferred tax liabilities* (NDTL) terbukti berpengaruh terhadap tingkat *discretionary accruals*. Sebelumnya menurut Djameluddin, dkk (2007) juga menemukan bahwa beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari selisih antara aktiva pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat *discretionary accruals*. Kemungkinan manajer akan melakukan manajemen laba dengan cara memainkan beban pajaknya, dikarenakan beban pajak merupakan akun terakhir yang mengurangi laba perusahaan sebelum laba bersih dilaporkan

Dewan Komisaris Independen adalah bagian dari anggota dewan komisaris yang merupakan organ utama bagi penerapan praktik *goodcorporate governance*, dengan melihat pada fungsi yang dimiliki. Salah

satu fungsi yang dimiliki dewan komisaris independen yaitu pengawasan, dimana komisaris menjalankan pengawasan keuangan terhadap organisasi serta terhadap personalia. Bentuk pengawasan yang dilakukan komisaris pada keuangan salah satunya yaitu berupa memonitor kinerja keuangan secara rutin, baik *cash flow* maupun laba rugi. Kemampuan dewan komisaris independen tersebut dalam mengawasi dan mengontrol operasional perusahaan diharapkan dapat menekan terjadinya manajemen laba. Menurut hasil penelitian Andayani (2010), Rahmawati dan Rini (2008) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals* pada perusahaan manufaktur. Demikian pula dengan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Pangaribuan (2014), menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *discretionary accruals* pada perusahaan perbankan. Namun berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Widiatmaja (2010) dan Purwandari (2011) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat *discretionary accruals* pada badan usaha sector perbankan.

Komponen kedua untuk mengukur corporate governance adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris adalah jumlah seluruh dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang tujuannya agar dewan komisaris bisa mewakili kepentingan para pemegang saham dalam

mengawasi tindakan manajemen. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris diyakini dapat memonitor perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Peran dewan komisaris dalam memonitor laporan keuangan ini juga diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kualitas pelaporan oleh pihak manajemen, tanpa ada rekayasa dalam menyajikan laporannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumanto (2014), menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*. Hal ini berarti semakin banyak dewan komisaris akan memperkecil tingkat praktik manajemen laba, karena tingkat pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Ukuran dewan komisaris ini akan membatasi ruang lingkup manajemen untuk mencari kesempatan dalam manajemen laba. Namun menurut Widiatmaja (2010) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Komponen ketiga dari corporate governance adalah komite audit. , komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus, atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit mempunyai peran yang sangat

penting dan strategis dalam hal memelihara kreadibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk *me-riview* informasi keuangan yang disediakan untuk pemegang saham maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal Murhadi (2009).

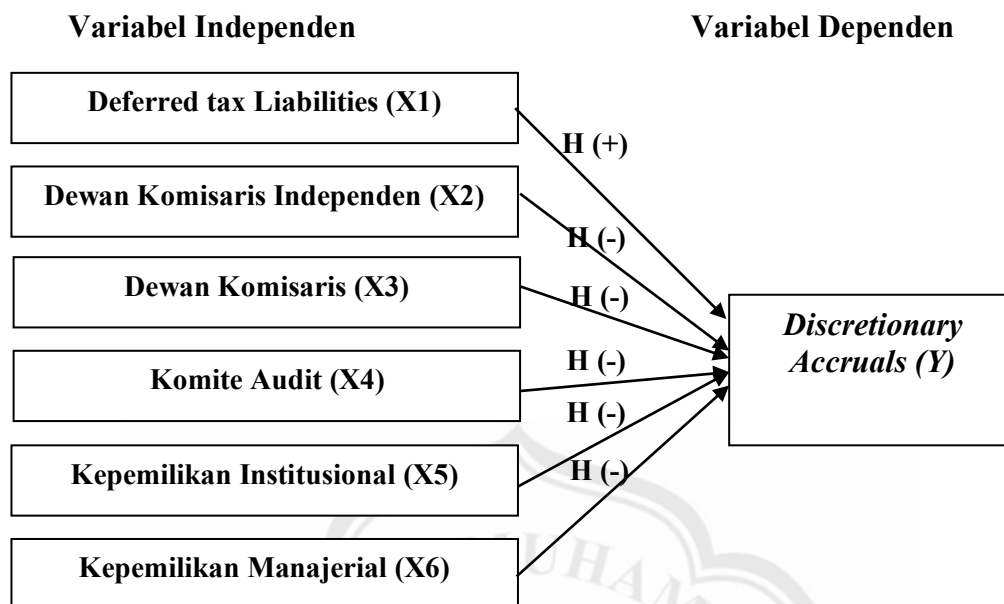
Komponen untuk mengukur struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Purwaningtyas, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumanto (2014) dan Purwandari (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*. Sedangkan menurut Mahiana dan Wayan (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat *discretionary accruals* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI karena kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Kusumaningtyas (2012), Widiatmaja (2010) juga menyatakan bahwa keberadaan kepemilikan

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat *discretionary accruals*.

Komponen selanjutnya untuk mengukur struktur kepemilikan adalah kepemilikan manajerial. Pangaribuan (2014) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *discretionary accruals* pada perusahaan perbankan, sedangkan Widiatmaja (2010) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat *discretionary accruals*. Dalam teori agensi, adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agen melalui penyalarsan kepentingan, dimana pihak manajemen tidak akan lagi bertindak mementingkan diri sendiri.

Mahariana dan Wayan (2014), menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*. Manajer sebagai pemegang saham perusahaan akan ditinjau oleh pihak-pihak yang terkait dalam kontrak seperti pemilihan komite audit yang menciptakan permintaan pelaporan keuangan berkualitas oleh pemegang saham, kreditur, dan pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, manajemen akan termotivasi untuk mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan hasil penelitian, disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Deferred tax liabilities* terhadap tingkat *discretionary accruals*.

Deferred tax liabilities merupakan kewajiban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2003: 115).

Dalam penelitian Kasipilai dan Mahenthiran (2013) menyebutkan bahwa perusahaan menggunakan komponen pajak tangguhan untuk menghindari perununan laba. Sejalan dengan itu menurut (Siagian, 2014) menyebutkan bahwa perubahan *Net deferred tax liabilities* (NDTL) terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Sebelumnya

Djamaluddin, dkk (2007) juga menemukan bahwa beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari selisih antara aktiva pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Kemungkinan manajer akan melakukan manajemen laba dengan cara memainkan beban pajaknya, dikarenakan beban pajak merupakan akun terakhir yang mengurangi laba perusahaan sebelum laba bersih dilaporkan.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pajak tangguhan dengan manajemen laba perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut. Beban pajak yang lebih besar daripada pajak kini atau pajak yang dibayarkan akan menimbulkan kenaikan liabilitas pajak tangguhan. Maksudnya, terdapat pengalihan beban pajak periode sekarang ke periode mendatang untuk menunda biaya akibat peningkatan laba. Artinya manajer menggunakan kesempatan untuk bisa menunda biaya melalui liabilitas pajak tangguhan dengan tujuan untuk menaikkan laba perusahaan. Kondisi sebaliknya mungkin juga terjadi ketika manajer ingin menurunkan laba maka akan terjadi penurunan liabilitas pajak tangguhan. Dari uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Deferred tax liabilities* berpengaruh positif terhadap tingkat *discretionary accruals*.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap tingkat *discretionary accruals*.

Dewan Komisaris independen adalah bagian dari anggota dewan komisaris yang merupakan organ utama bagi nerepan praktik *goodcorporate governance*, dengan melihat pada fungsi yang dimiliki. Salah satu fungsi yang dimiliki dewan komisaris independen yaitu pengawasan, dimana komisaris menjalankan pengawasan keuangan terhadap organisasi serta terhadap personalia. Bentuk pengawasan yang dilakukan komisaris pada keuangan salah satunya yaitu berupa memonitor kinerja keuangan secara rutin, baik *cash flow* maupun laba rugi. Kemampuan dewan komisaris independen tersebut dalam mengawasi dan mengontrol operasional perusahaan diharapkan dapat menekan terjadinya manajemen laba. Andayani (2010) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals* pada perusahaan manufaktur. Demikian pula dengan Pangaribuan (2014), menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Rahmawati dan Rini (2008) juga menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen mampu mengurangi manajemen laba pada perusahaan.

Untuk menguji lebih lanjut mengenai peran dewan komisaris independen dalam menekan terjadinya manajemen laba. Meskipun terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa dewan komisaris

independen dalam memonitor dan mengendalikan manajemen terutama pengawasan keuangan perusahaan, ini berarti bahwa dengan adanya fungsi tersebut komisaris independen yang melaksanakan tugasnya dan menjalankan pengawasannya terhadap keuangan perusahaan secara efektif dapat mencegah dan meminimalkan praktik-praktik rekayasa keuangan seperti pada laporan laba rugi. Dengan demikian, untuk menguji lebih lanjut mengenai *corporate governance* yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*.

3. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap tingkat *discretionary accruals*.

Komponen ketiga untuk mengukur *corporate governance* adalah ukuran dewan komisaris. Peran dewan komisaris dalam memonitor laporan keuangan ini juga diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kualitas pelaporan oleh pihak manajemen, tanpa ada rekayasa dalam menyajikan laporannya. Menurut Sumanto (2014), menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin banyak dewan komisaris akan memperkecil tingkat praktik manajemen laba, karena tingkat pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Ukuran dewan komisaris ini akan membatasi ruang lingkup manajemen untuk mencari kesempatan dalam manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menguji lebih lanjut mengenai *corporate governance* yang diukur dengan ukuran menguji lebih lanjut mengenai *corporate governance* yang diukur dengan ukuran dewan komisaris, yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba perusahaan. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap tingkat *discretionary accruals*.

Komponen keempat dari *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk *me-review* informasi keuangan yang disediakan untuk pemegang saham

maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal.

Keberadaan komite audit dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudia diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Penelitian Purwandari (2011), menyebutkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Demikian pula widiatmaja (2010) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin tingginya ukuran komite audit maka akan semakin rendah kemungkinan untuk melakukan tingkat *discretionary accruals*. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit akan mengurangi terjadinya manajemen laba. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit akan mengurangi terjadinya manajemen laba, karena tingkat pengawasan dan pengendalian

terhadap manajemen akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tingkat *discretionary accruals*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Purwaningtyas, 2011). Sumanto (2014) dan Purwandari (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sedangkan Mahiana dan Wayan (2014) Pemilik saham institusional dianggap memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Dalam teori agensi manajer dan pemegang saham masing-masing memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda terhadap informasi laba, maka dengan semakin tinggi kepemilikan semakin kuat control eksternal terhadap nilai perusahaan dan mengurangi *agency cost*. Kepemilikan institusional yang dikenal sebagai *sophisticated investors* atau investor yang canggih yang tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer yang oportunistis (Sumanto, 2014).

Keberadaan kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja

manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar pula kekuatan institusi untuk mengawasi manajemen sehingga akan mengoptimalkan nilai perusahaan. Dari uraian tersebut maka hipotesis dirumuskan adalah berikut:

H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*.

6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Komponen keenam selanjutnya untuk mengukur struktur kepemilikan adalah kepemilikan manajerial. Dalam teori agensi, adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agen melalui penyelarasan kepentingan, dimana pihak manajemen tidak akan lagi bertindak mementingkan diri sendiri (self interest). Berdasarkan penelitian Pangaribuan (2014), Mahariana dan Wayan (2014), menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tingkat discretionary accruals*.

. Manajer sebagai pemegang saham perusahaan akan ditinjau oleh pihak-pihak yang terkait dalam kontrak seperti pemilihan komite audit yang menciptakan permintaan pelaporan keuangan berkualitas oleh pemegang saham, kreditur, dan pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, manajemen akan termotivasi untuk mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas.

Manajer yang memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan berarti ia akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola laporan keuangan, dan manajer akan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tanpa mengambil risiko yang akan merugikan sebagai pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan adalah sebagai berikut:

H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat *discretionary accruals*.